

TESIS

**PEMBATASAN HAK REMISI
NARAPIDANA KEJAHATAN LUAR BIASA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



**Disusun Oleh :
KADEK YENI KRISTIYANTI
NIM : 12114008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2018



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : Kadek Yeni Kristiyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12114008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- II. Judul Tesis: PEMBATASAN HAK REMISI NARAPIDANA KEJAHATAN LUAR
BIASA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
- III. Nama Pembimbing: PROF. DR. H. AFDOL, S.H., M.S.

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal,, 2017

Ketua

Sekretaris

Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.

MOH. SALEH, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 10 Agustus 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :




Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

PRO PATRIA

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Moli. Saleh, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



KADEK YENI KRISTİYANTI

NIM : 12114008

PRO PATRIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Orisinalitas Penelitian	6
1.6. Tinjauan Pustaka	
1.6.1 Konsep Negara Hukum	8
1.6.2 Konsep Perlindungan Hukum	14
1.6.3 Konsep Hak Asasi Manusia	20
1.6.4 Teori Kejahatan	21
1.6.5 Konsep Kejahatan Luar Biasa	26
1.7. Metode Penelitian	
1.7.1 Tipe Penelitian	29
1.7.2 Pendekatan Masalah	29
1.7.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	29
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	30

1.7.5 Analisis Hukum	31
1.8. Sistematika Penulisan	31
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KEJAHATAN LUAR BIASA	
2.1 Konsep Narapidana	33
2.2 Konsep Remisi	43
2.3 Pemberian Remisi Kepada Narapidana	49
2.4 Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kejahatan Luar Biasa.....	53
2.5 Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kejahatan Luar Biasa Kaitannya Dengan Teori Keadilan.....	72
BAB III PEMBATASAN HAK TERHADAP NARAPIDANA KEJAHATAN LUAR BIASA	
3.1 Kejahatan Luar Biasa.....	77
3.2 Remisi Sebagai Hak Dasar Bagi Setiap Narapidana	82
3.3 Pemberian Remisi Bagi Terpidana Kejahatan Luar Biasa Terkait Dengan Tujuan Pemidanaan	84
3.4 Pembatasan Hak Untuk Mendapatkan Remisi Bagi Terpidana Kejahatan Luar Biasa.....	87
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	96
2. Saran	97
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Remisi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sistem pemasyarakatan yang bersifat pembinaan agar dapat menuntun narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan kelak dapat berkumpul kembali di tengah masyarakat. Oleh karena itu, remisi harus diberikan kepada seluruh narapidana, baik itu narapidana umum atau narapidana kejahatan luar biasa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memuat tentang batasan-batasan tertentu terhadap pemberian remisi khusus bagi narapidana kejahatan luar biasa. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang pembatasan hak remisi narapidana kejahatan luar biasa jika dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remisi diberikan sebagai wujud *reward* kepada narapidana yang diberikan setelah narapidana tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mendorong narapidana agar menyadari kesalahannya dan dapat kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Walaupun terdapat pembatasan pemberian remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa, akan tetapi pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi kita yang mencantumkan bahwa Pemerintah dapat memberikan batasan terhadap pemenuhan hak tertentu demi kepentingan dan keadilan masyarakat. Hanya saja, batasan tersebut seharusnya dicantumkan dalam bentuk undang-undang.

Kata Kunci: Pembatasan Hak Asasi Manusia, Kejahatan Luar Biasa, Remisi

ABSTRACT

Remission is one of rights possessed by inmates based on Article 14 paragraph (1) Act Number 12 of 1995 about Correctional Institution. It is bestowed as supporting to implement fostering prison system in order to guide the inmates become better and mingle again with community. Therefore, remission is strongly granted to all prisoners who commit general crime as well as extraordinary crime. Meanwhile, Government Regulation Number 99 of 2012 about Second Amandement of Government Regulation Number 32 of 1999 about the Terms and Procedures of implementation of the Right of Inmates which contains specific limitation on granting special remission for extraordinary crime prisoners has been promulgated. The limitation of remission for extraordinary crime prisoners basically has been in accordance with Indonesian constitution which also states that Government can imposes limitation on the fullfilment of certain rights on behalf of interest and justice in society. Nevertheless, these limitation is ought to be included in to the form of Law. The Author of thesis intends to research and analize about limitation of remission given to extraordinary crime prisoner which is related to accomplishment of human right.

Research Method applied is normative legal research. It is a legal research conducted by examining primary legal substances and secondary legal substances. Meanwhile, the process of searching and collecting data is executed by law and conceptual approach.

The Result of research has shown that remission is a reward granted to prisoners who have fulfilled the requirements specified by provision in regulation. It aims to encourage prisoners to realize their mistakes and mingle to community. Even though there is a limitation in granting the remission for extraordinary crime prisoners, it does not violate the constitution which states that Government is able to permit limitation on fulfillment of certain rights on behalf of interest and justice in society. Notwithstanding, the limitation should be stated in to law.

Keywords: *Limitation in a human rights perspective, extraordinary crimes, remission.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penguraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis pembalasan dan penjeraan. Hal ini tercermin dalam falsafah yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang melaksanakan tujuan pemidanaan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan narapidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukannya serta menjadikan narapidana tersebut dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Salah satu strategi yang digunakan guna menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah melalui pemberian hadiah (*reward*) berupa remisi. Terlepas dari kejahatan yang dimilikinya, narapidana mempunyai hak yang sama untuk memperoleh remisi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemberian hak yang sama ini merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai langkah untuk menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan hukum, diharapkan dapat menciptakan terwujudnya kehidupan bernegara yang aman dan sejahtera.
2. Terkait syarat remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana kejahatan luar biasa ditinjau dari perspektif HAM tidak melanggar

HAM . Ketentuan dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin persamaan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, jika disimak dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara nyata ada pembatasan tertentu terhadap hak-hak dengan maksud memenuhi tuntutan rasa keadilan. Artinya hak tersebut dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan bukan penghapusan terhadap remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana kejahatan luar biasa tetap diberikan hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat namun diperketat dengan beberapa syarat tambahan. Dengan kata lain pemberian hak yang berbeda tidaklah serta merta melanggar hak asasi seseorang jika hal tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan dan keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Publik saat ini banyak yang beranggapan bahwa pemberian hukuman yang berat dan penghapusan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan luar biasa merupakan langkah tepat guna memutus mata rantai tindak pidana kejahatan luar biasa. Padahal, dengan memberikan perlakuan tersebut, bukan berarti narapidana tersebut akan jera. Bahkan, kemungkinan untuk timbulnya permasalahan baru menjadi lebih besar. Ketentuan mengenai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa adalah

bagian dari kerangka besar sistem pembinaan narapidana dengan tujuan preventif, rehabilitatif, dan integratif. Oleh karena itu, remisi kepada pelaku kejahatan luar biasa tetap harus diberikan dengan tetap memperhatikan terwujudnya keadilan hukum.

2. Pembatasan remisi terhadap kejahatan luar biasa sebaiknya selalu dipertahankan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa serta memberi pelajaran khususnya bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diharapkan mampu diaplikasikan secara komprehensif sehingga tujuan dari adanya pembatasan remisi dapat terwujud sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana kejahatan luar biasa. Hanya saja, diperlukan payung hukum yang lebih kuat untuk menghindari timbulnya permasalahan di masyarakat. Sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak tertentu hanya diperbolehkan diatur dalam undang-undang. Jadi, disarankan agar melakukan revisi atau kajian terhadap Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, khususnya mengenai pembatasan hak pemberian remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975.
- Bassiouni, M. Cherif, *Crimes against humanity*, Oxford Press, 1998.
- Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, Jakarta, 2006.
- Boli Sabon, Max, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2010.
- Donelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Manas Publication, New Dehli, 2003.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Edisi Ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Homby, A.S., *Oxford Advanced Leamer's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tatanegara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Marbun, Rocky, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Pristiwati, Rita, *Pola Pembinaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. cet. Pertama*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Puspa Rini S, Widya, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Edisi IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Raharjo, Sacipto, *Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, 2000.

- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.
- Sujatno, Adi, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta, 2000.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Kainisius, Yogyakarta, 1995.
- Sunarto, D.M., *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Syani, Abdul, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Tri P., Salviadona, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU/I/2003 terhadap proses hukum Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Bom Bali :Kajian Tentang Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka, Terdakwa, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Program Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

C. Sumber Lainnya

<http://urai28imam.blogspot.com>. Diakses hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016.

<http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>. Diakses hari Rabu, tanggal 5 Maret 2016.